



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	28 (Dua Puluh Delapan)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Direktur Utama PT Energy Manajement Indonesia/EMI (Persero).
Hari, Tanggal	:	Rabu, 15 Februari 2023
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Mengenai Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022, Progres dan Roadmap atas akuisisi PT Energy Manajement Indonesia (EMI).
Hadir	:	1. 45 Orang dari 56 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), Darmawan Prasodjo; 3. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha P; 4. Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah; 5. Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung Firstantara; 6. Direktur Utama PLN ICON+, Ari Rahmat Indra C; 7. Direktur Utama PT Energy Manajement Indonesia/EMI (Persero), Surya Fitriadi. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan jajarannya pada pukul 11.02 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT PLN (Persero) terkait Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 serta Progres dan Roadmap atas Akuisisi PT Energy Management Indonesia.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Direktur Utama, Jajaran Direksi dan seluruh unit PLN atas pencapaian kinerja korporasi tahun 2022 yang jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik pada sisi operasional, keuangan maupun pelayanan pelanggan.
3. Komisi VI DPR RI mendukung upaya PLN melakukan optimasi kontrak Pembangkit IPP sebagai salah satu usaha menekan Take or Pay akibat *oversupply* sistem ketenagalistrikan sehingga memberikan dampak positif bagi korporasi maupun negara berupa penurunan beban Take or Pay (ToP) sebesar Rp.47,5 Triliun.
4. Komisi VI DPR RI meminta Direktur Utama PLN beserta jajaran melakukan upaya lebih maksimal dalam menyetatkan kondisi keuangan PLN, sehingga kondisi keuangan PLN semakin kokoh.
5. Komisi VI DPR RI mendukung implementasi ICONNET agar dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI demi mempercepat kemajuan masyarakat dengan pola *bundling* pada segmen tertentu.
6. Komisi VI DPR RI mendukung PLN untuk tetap memperoleh dukungan *Domestic Market Obligation* dan *Domestic Price Obligation* dalam penyediaan energi primer untuk penyediaan listrik, sehingga di tengah ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga komoditas energi, PLN tetap dapat menyediakan pasokan listrik yang cukup dan handal kepada masyarakat. Untuk itu, percepatan implementasi BLU batu bara perlu dipercepat untuk direalisasikan.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT PLN (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13:59 WIB.

**DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PERSERO)**

Ttd.

DARMAWAN PRASODJO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A

A-103